

ABSTRAK

Judul :

KEPENTINGAN HUKUM DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor 269/G/2014/PTUN-JKT)

OLEH :

JESTIKA AUGUSTINA
E1A012100

Skripsi ini bersumber pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/2014/PTUN-JKT, bertujuan untuk mendeskripsi dan mengkaji mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara serta untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam penentuan kepentingan hukum dengan penyesuaian makna kepentingan hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konsep.

Para pihak dalam perkara ini yaitu **H firman A Soediro** sebagai penggugat melawan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan** sebagai tergugat dan **DANDENMA MABES TNI** sebagai Tergugat II intervensi. **Objek gugatan** yaitu **Sertifikat hak pakai** No. 267/Duren Tiga tertanggal 30 Januari 2004 atas nama Dephankam cq Mabes TNI cq Denma Mabes TNI.

Sesuai dengan asas *point d'interest point d'action*, Penggugat seharusnya dikategorikan sebagai orang yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu KTUN yang digugat. Adapun alasannya karena Penggugat adalah ahli waris dari alm Brigadir Jenderal Herman Sarens Sudiro yang mempunyai hak menggarap tanah obyek sertifikat hak pakai dan adanya pelepasan hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat II intervensi tidak menunjukkan bahwa Penggugat dikategorikan tidak mempunyai kepentingan karena hubungan hukum yang dimiliki Penggugat adalah hubungan hukum dengan sertifikat hak pakai (sertifikat obyek sengketa) bukan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah atau bangunan yang melekat pada sertifikat hak pakai tersebut. maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kepentingan terhadap objek sengketa dan Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat dan seharusnya gugatan penggugat dikabulkan.

Kata Kunci : Kepentingan Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

Title:

**LEGAL INTEREST IN THE ADMINISTRATION OF THE DISPUTE
(Analysis of Decision No. 269 / G / 2014 / PTUN -JKT)**

BY :

JESTIKA AUGUSTINA
E1A012100

This Skripsi was done based on PTUN Jakarta No. 269 / G / 2014 / PTUN -JKT, which aimed to describe and examine the meaning sense of legal interest in the National Administration Lawsuit, also to investigate and analyze judge's legal considerations in determining the legal interest with adaptation on the meaning of legal interest in the Law of Procedural and Administrative Courts.

The parties in this case are H. A. Firman Soediro as plaintiff against the Head Office of South Jakarta Administration City who is as a defendant and DANDENMA MABE TNI as Second Defendant intervention. Objects suit which is the certificate of use No. 267 / Duren Tiga dated on January 30, 2004 on behalf of Dephankam cq Mabes TNI cq Denma Mabes TNI. *This research uses the method of normative juridical research by using the Statute approach and Conceptual approach.*

Based on point d'interest point d'action principle, plaintiff should be categorized as person whose importance is disadvantages by KTUN that is being stued. The reason is because the plaintiff was the heir of deceased of Brigadier General Herman Sarens Sudiro who had the right to work on the land rights of use certificate and the release rights upon the land of the Plaintiff to the Defendant II interventions did not show that the Plaintiff was categorized as not having interest because of the legal relationship owned by the Plaintiff is legal relationship with use rights certificate (certificate subject of dispute) is not the legal relationship between the Plaintiff with the land or a building written on the right of use certificate. Therefore it can be concluded that the plaintiff has a legal relationship, the interests upon the object of dispute and also the capacity to file a lawsuit to the State Court of Administration thus Plaintiff and his claim should be granted.

Keyword : Legal Interest in The Administration of The Dispute.